

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cetakan 1, 2014. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Ahmadi Miru and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. SAH MEDIA, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan ke-7, Juni 2017. Jakarta: Kencana, 2017.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2017.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Islam Secara Komprehensif*. 1st, November 2017 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hariyanto, Eri. *Mewaspada Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*, 2020.
- Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan ke 1 Juni 2018. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel), 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- J. Widijantoro, Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, and N.Budi Ariyanto. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Cetakan ke-4 Tahun 2019. Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Muliaman D. Hadad. *OJKWay Implementasi Manajemen Perubahan Di OJK*. Cetakan ke-1 Tahun 2016. ReneAsia Publika, 2016.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013, n.d.
- Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Cetakan ke-3 Tahun 2020. PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Yeyen Maryani and Cece Sobarna. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011. Edisi Pertama 2011. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.*

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Ditetapkan pada tanggal 30 November 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ditetapkan pada tanggal 20 April 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Disahkan pada tanggal 22 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446.

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Ditetapkan pada tanggal 3 November 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266.

Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat. Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315.

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 10 September 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151.

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 22 April 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditetapkan pada tanggal 14 September 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039.

Peraturan OJK Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Ditetapkan pada tanggal 17 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264.

Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290.

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 14 april 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99.

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Tehnologi Informasi. Ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK.

Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK. Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2001.

Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat. Ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2014.

Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017.

Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Di Sektor Jasa Keuangan. Ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2018.

C. Jurnal, Penelitian, Siaran Pers, Berita Internet, Bahan Sosialisasi OJK, dan

Lain-lain

A. Iyustina. 'Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah).' *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 210374.

Anisa Yunita Sari and Naili Sa'ida. 'Investasi Edukasi Literasi Keuangan untuk Anak Usia Dini di Indonesia'. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (26 December 2021): 2085–94. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1369>.

- Apriyanti, Hani Werdi. 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia'. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 July 2018): 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.
- Atin Meriati Isnaeni. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)'. 2018. *Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram*, n.d. <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2017. Konindo. *Majalah Konsumen Indonesia*.
- Bernadetta Tjandra Wulandari. 'Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan'. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 2 (29 December 2022): 30–46. <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4483>.
- Denico Doly. Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR. 'Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku' Maret, no. 1 (2012).
- Departemen Literasi, Inklusi Keuangan Dan Hubungan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan. Hasil Survei SNLIK Tahun 2022.
- Departemen Perlindungan Konsumen. Materi Sosialisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. 2022.
- Diana Tantri Cahyaningsih. 'Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot'. *Journal Rechts Vinding Online*, March 2020, 2089–9009.
- Gafur, Abdul. Riba Menurut Pemikiran AL-Gazali, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi, Juni 2022. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.
- Info Humas OJK. Siaran Pers Peningkatan Perlindungan Konsumen. 2 Pebruari 2023.
- Inosentius Samsul. 'Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan' 4, no. 2 (2013).
- Izza, Diana, and Siti Fatimatuz Zahro. *Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah*. Universitas Nurul Jadid Maret, no. 2.2021.
- Kemendikbud. KBBI Daring. Accessed 21 January 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>.

- Kurnia Puspita Eka Putri. 2017. Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh OJK Pada Sektor Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Niru Anita Sinaga and Nunuk sulisrudatin. Dosen Tetap Universitas Suryadarma Jakarta. 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia' Volume 5 No.2, Maret 2015 (2015).
- OJK. Siaran Pers. 6 Juni 2023. Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Ditengah Dinamika Perekonomian Global. SP59.GKPB.OJK.VI.2023.
- OJK. Siaran Pers. 7 Januari 2023. Perkuat Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. SP 03.DHSM.1.2023.
- OJK. Siaran Pers. 18 Mei 2022. POJK Perlindungan Konsumen. SP 24.DHMS.OJK.V.2022
- OJK. Siaran Pers. 19 Desember 2022. Tingkatkan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Penipuan Berkedok Investasi.
- OJK. Standar Internal Dispute Resolution (IDR) Sektor Jasa Keuangan. Juli 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan'. Accessed 13 April 2023. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Buku Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan. Agustus 2020.
- Puspitasari, Novi. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Oktober, no. 2. 2011.
- Qur'an Kemenag. Accessed 29 January 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Retno Eko Mardani. 2019. Politik Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dan Masyarakat. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rusydi Bustanul Arifin. 2015. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tesis. Pascasarjana Universtas Islam Indonesia.
- Tirta Segara, OJK. Desember 2021. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.

- Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- Tri Baskoro Bintang, Amran Suadi, Ramlani Lina Sinaulan. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pdf, n.d.
- Tri Setiady and Suhaendi Salidja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System. *Yustitia* 7, no. 1 (26 October 2021): 57–80. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.15>.
- UNCTAD, United Nation. ‘United Nations Guidelines for Consumer Protection’ New York and Geneva, 2016 (n.d.).
- Wymeersch, Eddy. The Structure of Financial Supervision in Europe: About Single Financial Supervisors, Twin Peaks and Multiple Financial Supervisors. *European Business Organization Law Review (EBOR)* 8, no. 2 (June 2007): 237–306. <https://doi.org/10.1017/S1566752907002376>.
- Yusuf Shofie. Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). hukumonline.com. Accessed 1 April 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-badan-perlindungan-konsumen-nasional-bpkn-lt5ee046de7671e>.
- Zulfa Nafiqoh. 2022. Kajian POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.